

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Nikodimus,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: nangabayan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis, deskripsi dan menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana tata kelola Pemerintahan yang baik. berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan Kinerja, Tanggung Jawab, Komunikasi. Penelitian ini mengacu pada sifat-sifat penelitian kualitatif dan deskriptif. Beberapa subjek penelitian yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab Sintang, Kepala Bidang Penbembangan Sumber Daya Manusia Kab Sintang. Hasil penelitian menunjukkan tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sintang masih belum optimal, namun beitu berbagai upaya yang dilakukan pihak Pemeritnah terutama di Badan Kepegawaian Daerah terus berbenah untuk mengoptimalkan tata kelola kepemerintahan supaya berjalan dengan lancar kepada masyarakat..

Kata Kunci: Kinerja, Sumber Daya manusia,

Latar Belakang

Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Prinsip – prinsip Good governance menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti good governance maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (performance) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian Penyelenggaraan prinsip Good governance di Indonesia juga telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintahan yang baik secara konseptual, mempunyai pengertian bahwa kata baik atau good dalam istilah kepemerintahan yang baik yang memiliki makna bahwa good governance telah mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan

rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai organisasi sektor publik, pegawai dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan. Kinerja pegawai yang mencerminkan pada prinsip good governance dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat dapat memiliki kepercayaannya terhadap kinerja pegawai, bahwa disetiap kinerja pegawai yang mencerminkan pada prinsip-prinsip good governance diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Pemerintahan yang baik, dalam makna pemerintahan atau konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah asas tata pemerintahan yang baik yang pada dasarnya

bertumpuk pada dua landasan utama: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, yang berarti bahwa negara hukum dan demokrasi. Kini *good governance* telah menjadi istilah yang mampu memberikan sebuah prinsip yang dapat mewujudkan cara beretika atau kinerja seseorang pada organisasi hirarki dan swasta sebagai pusat riset para akademisi. *Good governance* juga telah banyak digunakan dalam tulisan-tulisan politik dan internasional terutama pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional yang berhubungan erat dengan kerjasama internasional dan perkembangan suatu daerah. Namun tidak terlepas dari peran pemerintah yang berkuasa terhadap perkembangan daerah.

Dalam perspektif Otonomi Daerah khusus di Indonesia, penerapan *good governance* merupakan suatu hal yang masih sulit dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau *local governance* yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksana asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan prinsip-prinsip otonomi daerah di harapkan agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di daerah dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang

seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. Suara-suara rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah.

Dari kendala *good governance* yang telah disinggung dapat membuat saya memberikan dugaan awal terhadap lokasi penelitian yang diduga menemukan sejumlah gejala yang mengindikasikan belum baik Prinsip-prinsip *Good Governance* dari aparaturnya setempat yang belum dijiwai secara baik, dan dapat dijelaskan berbagai gejala sebagai berikut : 1) Tidak adanya transparansi dalam mempublikasikan hasil tes Pegawai., 2) Perekrutan tenaga kerja tidak bersandar pada profesi dan ketrampilan yang dimiliki. 3) Para pegawai sering berperilaku semaunya dalam pelayanan masyarakat. 4) Masuk kantor sering kesiangan dan pulang kerja sebelum jam pulang. 5) Pegawai semaunya meninggalkan tempat kerja dengan alasan yang tidak jelas. 6) Memberikan Informasi yang simpang siur kepada warga yang membutuhkan pelayanan. 7) Sering berdiskusi politik dengan rekan kerja pada saat jam kerja. 8) Pelayanan yang berbelit-belit, agak mahal, makan waktu karna sering ditunda-tunda, serta sangat memusingkan, warga yang menginginkan pelayanan.

Masyarakat pada umumnya mengidentikan birokrasi sebagai proses berbelit, belit, waktu yang lama, biaya yang banyak, dan pada akhirnya menimbulkan keluhan kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak adil dan tidak efisien. Sikap mental yang arogan dan etos kerja rendah dikalangan birokrat sering menjadi sumber masalah bagi peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini. Masalah pelayanan publik atau *publik services*. Terjadinya kecenderungan seperti ini dikarenakan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani.

PEMBAHASAN

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tantangan utama dalam mewujudkan good governance adalah bagaimana mewujudkan ketiga karakteristik tersebut dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan ketiga hal itu dalam praktik pemerintahan sehari-hari di Indonesia. Tradisi pemerintahan yang ada sekarang ini masih sangat jauh dari ciri-ciri yang dijelaskan di atas. Pembagian peran antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah sering masih sangat timpang dan kurang proporsional sehingga sinergi belum optimal. Kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan secara efisien, berkeadilan, dan bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas. Strategi jitu perlu diambil oleh pemerintah dalam mengembangkan praktik governance yang baik. Luasnya cakupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas dari setiap persoalan yang ada, serta keterbatasan sumberdaya dan kapasitas pemerintah dan juga non-pemerintah untuk melakukan pembaharuan praktik governance mengharuskan pemerintah mengambil pilihan yang strategis dalam memulai pengembangan praktik governance yang baik. Pembaharuan praktik governance, yang dalam banyak hal masih mencirikan bad governance menuju pada praktik governance yang baik, dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, sejauh perubahan tersebut secara konsisten mengarah pada perwujudan ketiga karakteristik praktik pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Menurut (Dwiyanto,2005).Tata kelolah pemerintahan yang baik (Good governance) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati memahami mereka tentang good governance berbeda-beda ,namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka

membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik,maka kualitas pelayanan public menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat. Menurut (Efendi, 2005). Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Meruju pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik.Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar.Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi.

Tensparan serta Akuntabel

Pada dasarnya konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Responsibilitas (responsibility) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki standard profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness) merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka

melihat administrasi negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (responsive) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha – usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan.

Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “cheks and balance” dalam sistem administrasi. Mohamad Mahsun membedakan akuntabilitas dan responsibilitas, menurutnya keduanya merupakan hal yang saling berhubungan tetapi akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan akuntabilitas. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otoritasi asimetrik misalnya yang diawasi dengan yang mengawasi, agen dengan prinsipal atau antara yang mewakili dengan yang diwakili. Dari segi fokus dan cakupannya, responsibility lebih bersifat internal sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal.

Mohamad Mahsun 2013 juga membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal).

Kerja Sama

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Dengan bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab, mengandalkan bakat atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.

Menurut Robert L. Clitrap dalam Roestiyah (2008, h. 15) menyatakan “Kerjasama adalah merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama”, dalam kerjasama ini biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama. Selanjutnya Menurut Samani 2012 mengatakan kerjasama merupakan sifat suka atau gotong-royong adalah tindakan atau sikap mau kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama untuk keuntungan bersama. Tujuan kerjasama adalah agar seluruh anggota atau kelompok mampu mengatasi masalah dalam menyelesaikan pekerjaan, baik di segi pelayanan di pemerintahan maupun di bidang lain.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kerjasama merupakan bagian penting dalam melakukan sebuah kegiatan. Selain itu kerjasama juga menjadi factor penting dalam menjalankan roda pemerintahan, untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan bersama.

Bertanggung Jawab

Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak

lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggungjawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Abu dan Munawar (2007) tanggung jawab merupakan perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar harus menjahui yang bersifat negative dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal hal yang positif. Sementara menurut Wiyoto (2001) tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas normal, social dan harapan umum yang diberikan untuk meningkatkan hubungan antar manusia secara positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dan senyuman.

Menurut Burhanudin (2000) tanggung jawab adalah merupakan kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan. Ada pun aspek aspek tanggung jawab menurut Burhanudin sebagai berikut: 1) Kesadaran; Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melakukan secara fleksibel, sikap produktif dan mengembangkan diri, agar bisa memahami sikap dan belajar bagi dirinya sendiri. 2) Kecintaan atau kekuasaan; Memiliki sikap empati, bersahabat, dalam hubungan interpersonal. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhan yang lain dan memberikan potensi bagi dirinya untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain. 3). Keberanian.

Memiliki keberanian bertindak independen mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar system nilai.

Kesimpulan dan Saran

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang kalaboratif di perlukan kerja sama antar semua pihak, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dalam pekerjaan, bisa menjalin dalam dunia kerja, selain memiliki itu semua sumber daya aparatur juga harus memiliki kemampuan di bidang lain.

Dalam mengelolan pemerintahan yang baik harus ada Skill Kepemimpinan dalam dalam mengorganisir suatu pemerintahan” harus ada pembagian tugas (job description) yang jelas dalam melaksanakan tugas di pemerintahan. Harus ada transparansi akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Agus Efendi. (2005). Revolusi Kecerdasan Abad 21. Bandung: Alfabeta.
- Ahmadi, Abu & Munawar Sholeh. 2005. Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Burhanuddin. 2000, Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahsun, Mohamad, 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta.
- Samani, Muchlas, Hariyanto. 2012. Pendidikan karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wiyoto (2001) Gangguan Fungsi Kognitif. Surabaya: FK UNAIR